

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2010, *Hukum Pidana Militer*, Unila, Bandar Lampung.
- Araf, Al, dkk., 2007, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta.
- Basuki, Sulistyono, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT Pradnya Pramita, Jakarta.
- Dirjosisworo, Soedjono, 1986, *Segi Hukum Tentang Narkotika*, PT Karya Nusantara, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- HM, Rauf, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*, Bp Dharma Bhakti, Jakarta.
- Kaharudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud, Peter, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.

Salam, Moch. Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2016, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Sianturi S.R., 2010, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press Malang.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591)

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2882 Tahun 1970.

Surat Telegram Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 398 Tahun 2009.

Surat Telegram Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor ST/209/2010;

Surat Telegram Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor Str/483/2011.

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019.

C. Jurnal, Tesis, Makalah

Hidayatun, Siti, Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2020.

Histaka, Yudhi, “Kebijakan Penerapan Rehabilitasi Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pengguna Narkotika Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Atas Tindakan Pemecatan Dari Dinas Militer”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta.

Irawan, Dian, “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 7, No. 2, 2017.

Mulyadi, Hendra, 2018, “Penerapan Asas Kepentingan Militer Dalam Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit TNI Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus Pengadilan Militer I-03/Padang)”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Sihombing, Paul, 2009, “Kewenangan Peradilan Militer Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”, *Tesis*, Program Magister Humaniora Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Suherman, Andi, “Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2019.

Tarta, Ahmad Firman, “Penjatuhan Pidana Pemecatan Terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Umum”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Utami, Niken Subekti Budi dan Supriyadi, 2013, “Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Laporan Akhir Penelitian*, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Fauziah, Nur, “Panglima sindir prajurit jadi bandar: Sangat berbahaya”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/panglim-sindir-prajurit-jadi-bandar-sangatberbahaya.html>. diakses 9 November 2021.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 377 K/Mil/2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/Mil/2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Mil/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Mil/2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta Nomor 39-K/BDG/PMT-II/AU/IV/2017.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta Nomor 23-K/BDG/PMT-11/AU/II/2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta Nomor 25-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.

Putusan Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta Nomor 29-K/BDG/PMT-II/AD/IV/2019.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 03-K/PM.II-11/AU/I/2017.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 18-K/PM.II-11/AD/II/2018.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 15-K/PM.II-11/AD/II/2018.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 06-K/PM.II-11/AU/I/2018.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 32-K/PM.II-11/AU/III/2019.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 17-K/PM.II-11/AD/I/2019.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 06-K/PM.II-11/AD/I/2019.

Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 01-K/PM.II-11/AU/I/2020.